

Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 2 No 4, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Florentina Silalahi^{a,1*}, Recky H. E. Sendouw^{b,2}, Devie S. R. Siwij^{c,3}

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

¹florentinasilalahi65@gmail.com; ²reckysendouw@unima.ac.id; ³deviesiwij@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Gender Equality,
Women's Leadership

Accepted: 5 Oktober 2024

Revised : 10 Oktober
2024

Published: 31 Oktober
2024

This study aims to determine women's leadership in the perspective of gender equality in the Social Service of Minahasa Regency. This research uses a qualitative approach by collecting data using observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources with a total of 4 informants. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Research result shows that leader in the Minahasa district social services have not been optimal in carrying out their roles. Matter this is because motivation are still not optimal. Directions given to subordinates result in a lack of employee discipline and sense of responsibility.

INTISARI

Kata kunci:
Kesetaraan Gender,
Kepemimpinan
Perempuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Dinas Sosial Kabupaten: a) Peran pembinaan masih belum efektif dikarenakan sikap dari kepala dinas yang kurang tegas terhadap bawahan. b) Dalam pengambilan keputusan kepala dinas berpedoman pada skala prioritas dalam menjaga objektivitas dan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. c) Kemampuan motivasi sudah efektif dengan memberdayakan dan memahami kondisi bawahannya. d) Kemampuan mengendalikan emosional yang baik, yang tercermin dari pengendalian emosi, sikap tenang dalam menghadapi masalah, serta upaya dari kepala dinas membangun hubungan interpersonal yang positif dengan bawahan.

I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender akan selalu menjadi topik yang terus muncul dan penting untuk dibahas dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Kepemimpinan merupakan seni memengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan mereka untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. E. (2021), mendefinisikan Kepemimpinan sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama.[1]

Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi membutuhkan peran pemimpin yang efektif dan visioner. Dalam hal kepemimpinan, tidak ada batasan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki masing-masing kekhasan karakteristik dalam memimpin. Seorang pemimpin ideal harus memiliki kriteria kemampuan memimpin, dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Setidaknya perempuan ketika menjadi pemimpin dapat berperan dalam mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Mereka tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekannya. Selain menjadi inspirasi, perempuan juga memiliki sifat yang dianggap sebagai kelebihan untuk membantu pemimpin perempuan, seperti ketekunan, keuletan, perhatian, komunikatif, lembut tapi tegas, teliti, cermat, sabar, indah, persuasif dan kreatif (Mokat J. E. H). [2]

Berdasarkan hasil riset World Economic Forum dalam laporan Kesenjangan Gender Global 2021, Indonesia masih berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender. Jika melihat data pada Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan yang menduduki posisi manajemen telah mencapai 33,08 % pada tahun 2020, tetapi harus turun menjadi 32,5 % pada tahun 2021 dan berlanjut mengalami penurunan menjadi 32,26 % pada tahun 2022. Selain itu, BPS juga mencatat bahwa jika dilihat berdasarkan Provinsi, proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial paling banyak secara nasional pada 2022 berada di Provinsi Sulawesi Utara yakni 46,09%. Adapun kesetaraan gender perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Minahasa juga terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II di Minahasa periode 2019-2024 berjumlah 35 orang. Rinciannya yakni 17 orang atau 48,57 % dari anggota dewan di Minahasa berjenis kelamin perempuan, sedangkan 18 orang atau 51,43 % sisanya adalah laki-laki.

Dinas sosial Kabupaten Minahasa adalah salah satu lembaga pemerintahan di Kabupaten Minahasa yang sudah menerapkan kesetaraan gender dengan tidak adanya penolakan terhadap pemimpin perempuan yakni sebagai kepala dinas. Disamping harus menjalankan perannya sebagai seorang kepala dinas perempuan, juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan juga seorang istri bagi suaminya yang diharapkan dapat mengelola dan menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam organisasi.

Pada observasi awal, peneliti menemukan berbagai situasi yang terjadi pada kepemimpinan kepala dinas perempuan pada dinas sosial Kabupaten Minahasa seperti miskomunikasi yang sering terjadi dalam memberikan intruksi kerja dengan bawahan, peran kepala dinas yang tidak tegas terhadap bawahan yang tidak disiplin dalam hal kehadiran, dan juga masalah lainnya yaitu beberapa pegawai yang hanya paham terhadap tugas dan kewajibannya sehingga ketika atasan bertanya tentang pekerjaan rekannya dalam satu bidang yang tidak di tempat, mereka tidak bisa menjawab. Hal ini menunjukkan kurangnya pembinaan dan kerjasama antara pimpinan dengan rekan kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di dinas sosial Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan perempuan sebagai kepala dinas di dinas sosial Kabupaten Minahasa.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga pemahaman wawasan yang berkenaan dengan kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian kepemimpinan perempuan dan

kesetaraan gender. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi khalayak mengenai kesetaraan gender sebagai sebuah kajian yang bisa membuat masyarakat lebih berfikir terbuka dalam menyikapi suatu bentuk konstruksi sosial yang berkaitan dengan hak dasar manusia tentang hal yang bersifat kekuasaan dan kemampuan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menjelaskan data yang diperlukan untuk penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan, Sugiyono (2019). [3]

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Informan dalam penelitian ini ialah para pegawai dan THL. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi (pengamatan) dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung pada kejadian yang terkait dengan subjek yang dibahas dalam penelitian. Kemudian peneliti melaksanakan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan yang dilakukan secara lisan atau melalui kontak langsung yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah yang sedang diteliti, serta melaksanakan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data tertulis maupun gambar dan suara.

Teknik keabsahan data yang digunakan merupakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang berbedadari data itu sendiri untuk memeriksa atau membandingkan dengan data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di dinas sosial Kabupaten Minahasa dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:321-330) yaitu dengan melakukan reduksi data yaitu merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih elemen penting, mengklasifikasikan, memfokuskan pada elemen penting dalam tema dan pola yang sama. Teknik kedua yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, kadang-kadang dilengkapi dengan grafik, matriks, bagan (chart), atau sejenisnya. Adapun teknik terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga disebut verifikasi data merupakan saat peneliti hampir selesai dengan tahap akhir analisis data. Karena ditahap ini semua data yang telah dikumpulkan dan diambil dari pokok-pokok masalah akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.[4]

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah hasil data yang dikumpulkan peneliti sendiri dari sumber pertanyaan yang berfokus pada kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di dinas sosial kabupaten minahasa sedangkan data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama dan dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dalam penelitian ini. Dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan perempuan adalah pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada seorang perempuan sehingga dia berhak dan dapat untuk memimpin, memengaruhi, menggerakkan, mengatur, mengawasi, mengurus serta bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh bawahannya. Pemimpin perempuan diartikan sebagai pengakuan dan kepercayaan terhadap perempuan untuk menduduki posisi tertinggi dalam suatu organisasi. Sebagai seorang pejabat publik di lingkungan pemerintah, perempuan harus kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan dan menjalankannya dengan baik sehingga orang percaya bahwa mereka ditunjuk untuk jabatan yang sesuai dengan keahliannya.

Dalam konteks dinas sosial, seorang pemimpin perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas diharapkan mampu untuk mendorong, mengarahkan, dan mengatur seluruh bawahan di dalam organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal karena dalam hal ini, pemimpin (kepala dinas) sangat berpengaruh dalam menentukan arah tujuan dari organisasi. Selain itu, seorang pemimpin didalam melaksanakan tugasnya juga harus berusaha untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan bawahannya agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan

baik. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender yang ada pada dinas sosial Kabupaten Minahasa. Adapun teori yang digunakan untuk melihat bagaimana peran seorang pemimpin (kepala dinas) ialah dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siagian, dimana untuk melihat peran dari seorang pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni peran yang bersifat interpersonal, peran yang bersifat informasional, dan peran pengambilan keputusan. [5]

1. Peran Interpersonal

Peran interpersonal mengacu pada kemampuan pemimpin untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain. Dalam kepemimpinan peran interpersonal dapat mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan bawahan juga di dalam dan di luar organisasi, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, serta memberikan perhatian dan penghargaan kepada bawahan atas pencapaiannya. Peran interpersonal juga mencakup kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dimana setiap bawahan merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan bersama.

Pada dinas sosial kabupaten Minahasa, peran interpersonal pemimpin (kepala dinas) memainkan peran yang sangat penting. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan bawahannya secara efektif dapat mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Namun, terdapat situasi dimana peran interpersonal kepala dinas yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena sering terjadi miskomunikasi antara kepala dinas dengan kepala bidang (kabid) dan kepala seksi. Seperti misalnya ketidakpastian mengenai lokasi yang akan digunakan untuk rapat, pertemuan, atau penyaluran bantuan. Selain itu, ketidakpastian mengenai waktu yang menyebabkan miskomunikasi antara kepala dinas dan kepala bidang.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kepala dinas belum berperan maksimal dalam membangun tim kerjanya. Hal ini disebabkan karena kepala dinas menganggap tim kerja sudah terbentuk dari sebelum kepala dinas masuk ke dinas sosial kabupaten Minahasa, adapun faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya komunikasi dan diskusi yang aktif, adapun pertemuan yang efisien (misalnya rapat, arahan saat apel pagi) berguna untuk mendiskusikan, memutuskan, dan melakukan pekerjaan bersama-sama agar semua permasalahan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

2. Peran Informasional

Menurut (Sudadi, 2020) peran informasional menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola informasi, baik informasi yang berasal dari dalam organisasi maupun dari sumber luar organisasi, dalam peran informasional ini mengemukakan terdapat 3 fungsi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memantau (*monitoring*), pembagi informasi atau peran informasional (*disseminator*), dan juru bicara (*spokesperson*). [6]

Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin, kepala dinas dalam menjalankan peran informasional harus mampu dalam menjelaskan kepada bawahannya menyangkut rencana-rencana kebijakan-kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan yang harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahannya, dan tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya. Pengelolaan informasi yang efektif juga akan memungkinkan kepala dinas untuk mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di antara anggota organisasi, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepala dinas sebagai pemimpin dalam organisasi harus memprioritaskan pengembangan keterampilan informasionalnya untuk mendukung kemajuan organisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian dan wawancara pada dinas sosial kabupaten Minahasa, pimpinan belum secara konsisten menjalankan peran informasionalnya dalam menjalankan kewajiban pelayanan. Pimpinan kurang komunikatif kepada bawahan dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga pelayanan belum berjalan secara efektif. Pimpinan belum secara rutin memberikan arahan atau informasi terbaru mengenai kebijakan, prosedur, dan target pelayanan kepada bawahan. Berbagai informasi penting tentang cara penyelesaian pekerjaan hanya diinformasikan pada kertas yang ditempelkan pada dinding kantor sehingga sebagian pegawai kurang paham dan tidak memperhatikan makna tentang informasi yang ada karena kurangnya

motivasi langsung yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Peran terakhir yang dimainkan oleh seorang pemimpin adalah peran pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk memilih dari sekian alternatif opsi yang tersedia sebagai upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, Mokot, J. (2019). [7]

Pengambilan keputusan adalah tanggung jawab terbesar dan paling penting bagi seorang pemimpin yang baik dalam organisasi apapun. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk menilai berbagai alternatif, dan menentukan tindakan mana yang paling tepat.

Pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, karena sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah resiko. Pada indikator ini peneliti juga menemukan bahwa peran pengambilan keputusan pemimpin pada dinas sosial secara konsisten memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan bagi bawahannya. Temuan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kinerja pegawai dievaluasi untuk perbaikan, dengan masukan dari semua pihak yang berkepentingan di dinas sosial Kabupaten Minahasa. Bawahan diberikan kesempatan oleh kepala dinas untuk memberikan rekomendasi dan masukan, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan tujuan dari seluruh pegawai yang ada di dinas sosial Kabupaten Minahasa.

Sebenarnya ada beberapa metode pengambilan keputusan yang bisa digunakan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi yaitu: 1) Kewenangan tanpa diskusi. Dalam metode ini, keputusan diambil oleh individu atau pemimpin yang memiliki kewenangan tertentu tanpa melibatkan diskusi atau konsultasi dengan pihak lain. Keputusan ini didasarkan pada otoritas atau hierarki dalam organisasi. 2) Pendapat ahli, Metode ini melibatkan mengumpulkan pendapat dan saran dari para ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait keputusan yang akan diambil. Keputusan diambil berdasarkan masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh para ahli. 3) Kesepakatan. Dalam metode ini, anggota organisasi secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang merupakan hasil kompromi dari berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di dinas sosial Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran interpersonal kepemimpinan kepala dinas Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya berjalan optimal. Miskomunikasi antara kepala dinas dengan kepala bidang dan kepala seksi menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Kepala dinas juga masih kurang berperan maksimal dalam membangun tim kerjanya.
2. Peran Informasional oleh kepala dinas perempuan di dinas sosial kabupaten minahasa juga belum optimal. Pimpinan kurang komunikatif kepada bawahan dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga pelayanan belum berjalan secara efektif.
3. Peran pengambilan keputusan oleh kepala dinas sebagai pimpinan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan oleh kepala dinas terhadap bawahan untuk memberikan rekomendasi atau masukan sehingga menghasilkan keputusan bersama.

REFERENSI

- [1] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.
- [2] Mokot, J. E. H. *Kepemimpinan, Perempuan dan Pengambilan Keputusan*. Deepublish.
- [3] Wahab, S., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Analisis Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(2), 791-800..

- [4] Mokot, J. (2019). Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 10-16
- [5] Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. E. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)*, 2(2).
- [6] Siagian Sondang. 2001, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- [7] Ismayanti, A., Gunawan, W., & Yunita, D. (2023). PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1), 165-177.
- [8] Sudadi, S. (2020). ANALISIS PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU MADRASAH (Studi di MI Muhammadiyah Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen). *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 4(1), 41-58.
- [9] Alaslan, A. (2021). Persepsi Masyarakat Dan Kepemimpinan Perempuan.
- [10] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- [11] Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- [12] Lorita, E., Endang, A., & Risdiyanto, B. (2023). Kiprah Perempuan Pemimpin Di Pemerintahan Daerah. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 249-254.
- [13] Lumingkewas dan Masengi, Pengantar Administrasi Publik . Bandung : Bumi Aksara , 2019.
E. Satspi, Teori Dan Perkembangan Menejemen Pelayanan Publik . UMJ Press, 2022.
- [14] R. Pusut, M. Kimbal, and M. Mamentu, "Pebangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso," *Jurnal Eksekutif* , vol. Volume 2, Nomor 2, 2017.
- [15] A. Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung : PT. Refika Aditama , 2012.
F. Nadhifa, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (skripsi). Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin., 2017.